Solo Pos
Halaman 3
Edisi Jumat, 29 November 2013

▸ ANGGARAN DAERAH

Dana Bansos Beratkan Pemda

SEMARANG—Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memperketat pemeriksaan dana bantuan sosial (bansos) dan hibah pemerintah daerah karena rawan dikorupsi.

- **Kebanyakan penerima dana bansos dan hibah adalah LSM yang tidak jelas.**
- **Alokasi anggaran pos bansos dan hibah banyak memberatkan keuangan pemerintah daerah.**

Insetyonoto
redaksi@solopos.co.id

Anggota BPK pusat, Agung Firman Sampurna, mengatakan dari data yang mereka peroleh, kebanyakan penerima dana bansos dan hibah adalah lembaga swadaya masyarakat [LSM] yang tidak jelas.

"Nama LSM tersebut ada yang aneh-aneh dan tidak terdaftar secara hukum," katanya kepada wartawan seusai berbicara pada *Forum Komunikasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK*, di Hotel Crown, Semarang, Kamis (28/11).

Bansos dan hibah yang didanai oleh APBD, lanjut dia, mestinya disalurkan kepada pihak-pihak yang berkompetan dalam rangka mendukung penyelanggaraan pemerintah daerah.

Di samping itu penyaluran dana bansos dan hibah harusnya dilakukan setelah pemerintah daerah memenuhi kebutuhan wajib, seperti pendidikan dan kesehatan.

"Kalau pemerintah daerah belum bisa memenuhi kebutuhan wajib ya jangan mengalokasikan dana bansos dan hibah," tandasnya.

Dia menyatakan alokasi anggaran pos bansos dan hibah ternyata banyak memberatkan keuangan pemerintah daerah.

Di beberapa provinsi, total anggaran dan bansos dan hibah ada yang mencapai Rp1,4 triliun atau mencapai 40% dari total APBD.

Pemerintah daerah, ujar Sampurna, semestinya tidak perlu mengeluarkan dana besar untuk bansos dan hibah, karena pemerintah pusat sudah mengalokasikan dana untuk hibah pendidikan, masyarakat miskin dan lainnya dengan nilai yang cukup besar.

"Dana bansos ini harusnya hanya untuk mereka yang mengalami risiko atau goncangan sosial, di mana kalau mereka tidak dapat bansos, akan mati," ungkapnya.

Belanja Fiktif

Sementara, pada sambutan pembukaan acara, Sampurna menyatakan dari laporan keuangan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota di Jateng dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) 2012 menemukan adanya belanja atau pengadaan fiktif.

Selain itu juga adanya kekurangan volume pekerjaan dan atau barang, serta melakukan pemahalan harga atau *markup*.

"Ini merupakan permasalahan umum di Jateng dan DIY yang menyebabkan kerugian negara," tandasnya.

Forum itu antara lain dihadiri kepala daerah, ketua DPRD, kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD), aparat penegak hukum di Jateng dan DIY.

Ketua DPRD Solo, Y.F. Sukasno, dalam acara tersebut meminta supaya BPK mempublikasikan hasil perbaikan laporan keuangan yang telah dilakukan pemerintah daerah.

"Supaya publik tahu pemerintah daerah telah melaksanakan perbaikan sesuai saran BPK, karena selama ini tidak ada publikasinya," ujar dia.